

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Dilihat dari status hukum pihak yang bersengketa, konflik antara pasukan Kurdi dan pemerintah Turki merupakan konflik bersenjata non-internasional karena status pemerintah Turki adalah Negara sedangkan pasukan Kurdi merupakan satuan bukan negara (non-state entity). Dalam syarat-syarat yang terdapat di *Commentary to the Geneva Conventions*, dan *database Geneva Academy of International Humanitarian Law*, syarat dan kualifikasi konflik bersenjata non-internasional telah terpenuhi oleh konflik yang sampai sekarang masih berlangsung antara pemerintah Turki dan PKK.

Label pemberontak yang disematkan pada PKK oleh pemerintah Turki tidak menghalangi realitas keterlibatan kedua pihak dalam konflik bersenjata. Karena itu, konflik bersenjata tersebut tetap terikat dengan hukum humaniter. Namun, tidak seluruh ketentuan hukum humaniter yang berlaku dalam konflik. Ketentuan hukum humaniter internasional yang tepat yang dapat digunakan dalam konflik Turki dan Kurdi adalah Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II. Namun demikian tidak seluruh ketentuan itu bisa diterapkan, dalam KJ 1949 khususnya yang bisa diterapkan hanyalah Pasal 3, karena Turki merupakan negara peratifikasi, sedangkan untuk Protokol II/1977 prinsipnya tidak bisa diterapkan karena Turki bukan negara peratifikasi, tapi beberapa ketentuan ini sudah menjadi Hukum Kebiasaan, maka ketentuan tersebut bisa digunakan.

B. Saran

Dalam penulisan ini, penulis memberikan saran yaitu:

1. Hendaknya, pemerintah Turki menganggap bahwa PKK merupakan pihak yang bertikai, dan para angkatan bersenjata PKK dianggap sebagai kombatan, jika suatu saat pasukan PKK tertangkap oleh militer Turki, pejuang PKK

tersebut harus diperlakukan sebagai tawanan perang, seperti yang telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, yang harus dipatuhi oleh Pemerintah Turki sebagai kewajiban karena telah meratifikasi Konvensi tersebut.

2. Peran masyarakat Internasional seperti *International Comittee of The Red Cross*, harus lebih memperhatikan implementasi hukum humaniter terlebih regulasi tentang perlindungan terhadap angkatan bersenjata non-internasional, Regulasi tersebut masih terbatas dan harus lebih diperbanyak, karena regulasi untuk konflik ini hanya terdapat dalam pasal 3 KJ 1949 dan Protokol Tambahan II/1977 yang mengatur tentang konflik bersenjata non-internasional, dimana perlindungan terhadap PKK baru bisa didapatkan saat mereka *hors de combat*. Begitu pulang dengan Liga Arab yang harus memperhatikan bangsa-bangsa seperti Kurdi karena salah satu tujuan Liga Arab yaitu untuk memerdekakan negara di kawasan arab yang masih terjajah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ambarawati dan Denny Ramdhany, 2013, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.

Arlina Permanasari, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta.

Susanti dan Efendi, 2019, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Haryomataram, G. P. H., 1984, *Hukum Humaniter*, Penerbit CV Rajawali, Jakarta.

Lexi J. Moelong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung.

Mahsyur Effendi, 1988, *Perkembangan Hukum Internasional Humaniter dan Sikap Indonesia di Dalamnya*, Penerbit Universitas Airlangga, Surabaya.

Mochtar Kusumaatmadja, 1980, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.

Ria Wierma Putri, 2011, *Hukum Humaniter Internasional*, Universitas Lampung, Bandar Lampung

Wahyu Wagiman, 2007, *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.

Yves Sandoz, Christophe Swinarski & Bruno Zimmermann (eds.), *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, ICRC, Martinus Nijhoff Publishers, Geneva, 1987.

Jurnal:

Adwani, 2012, *Perlindungan Terhadap Orang Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 Nomor 1 Januari 2012.

Jean-Marie Henckaerts, 2005, *Study on Customary International Humanitarian Law*, Jurnal International Review of The Red Cross, Volume 87 Nomor 857 Maret 2005.

Lolaksha Nagaveni, dkk, 2017, *International and Non-International Armed Conflicts and Application of International Humanitarian Law as Lex Specialis*, Volume 11 No. 11, Chotanagpur Law Journal, Lancaster University.

Mahfud, 2015, *Identifikasi Jenis Konflik Bersenjata Suriah Menurut Ketentuan Hukum Humaniter Internasional*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Thn. XVII, pp. 233-245, Universitas Syiah Kuala.

Nainggolan, P. P. 2014, *Aktivitas Internasional Gerakan Separatisme Papua*, Jurnal Pusat Penelitian - Badan Keahlian DPR RI, Kajian Vol. 19, Nmr. 3.

Suratman, Y. P. 2017, *Taksonomi Konflik-Konflik Internal di Indonesia sebagai Potensi Perang Proxy*, Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, Vol. 7, Nmr. 1.

Tesis:

Abhimantra Hertambang, 2007, *Pengaturan Umum Tentang Belligerent Dalam Kerangka Hukum Humaniter Internasional*, Universitas Atma Jaya Jakarta.

Perjanjian Internasional:

Konvensi Den Haag IV Tahun 1907 tentang Tata Cara dan Alat Berperang.

Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977.

Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III), 8 December 2005.

Skripsi:

Asteria Herbani, 2014, Aceh Sebagai Daerah Operasi Militer (1989-1998), Universitas Negeri Yogyakarta.

Dwita Ayu Hapsari, 2013, Analisis Keberlakuan Ketentuan *Geneva Conventions Relative to The Treatment of Prisoners of War 1949* serta *Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984* terhadap Penyiksaan atas Tawanan Terduga Teroris, Universitas Indonesia.

Schertian Ndolu, 2016, Kewenangan Dewan Keamanan PBB terhadap Penyelesaian Konflik Non-Internasional di Libya Tahun 2011, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Non publikasi:

Commentary to the Geneva Conventions 1949

List of Rules for Customary International Humanitarian Law.

Internet:

Arifud Dinali, 2014. *Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa*, <https://arifuddinali.wordpress.com/2014/05/31/piagam-perserikatan-bangsa-bangsa/>, diakses 28 Maret 2019.

Arlina Permanasari, 2008, Apa Arti Konflik Bersenjata?, <https://arlina100.wordpress.com/2008/12/22/apa-arti-konflik-bersenjata/>, diakses 4 November 2018.

Arlina Permanasari, 2008, Asas-Asas Hukum Humaniter, <https://arlina100.wordpress.com/2008/11/15/asas-asas-hukum-humaniter/>, diakses 16 November 2018.

Arlina Permanasari, 2008, Definisi Hukum Humaniter, <https://arlina100.wordpress.com/2008/11/11/definisi-hukum-humaniter/>, diakses 5 November 2018.

Arlina Permanasari, 2008, Siapa Sajakah Kombatan, <https://arlina100.wordpress.com/2008/12/03/siapa-sajakah-kombatan/>, diakses 7 November 2018.

BBC, 2017, Referendum kemerdekaan Kurdi Irak berlangsung kendati Irak menentang, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41384422>, diakses 26 November 2018.

- Breau S. C., The situation in south-east Turkey: Is it an armed conflict for the purpose of international humanitarian law?, http://campacc.org.uk/uploads/seminar_breau2.pdf, diakses 27 Maret 2019.
- Bruno G., 2007, Inside the Kurdistan Workers Party (PKK), <https://www.cfr.org/backgrounder/inside-kurdistan-workers-party-pkk>, diakses 27 Maret 2019.
- Crisis Group, 2019, Turkey-PKK Visual Explainer, <https://www.crisisgroup.org/content/turkeys-pkk-conflict-visual-explainer>, diakses 1 Maret 2019.
- Diyarbakar, 2016, Turkey's PKK Conflict: The Rising Toll, <http://www.crisisgroup.be/interactives/turkey/>, diakses 4 Maret 2019.
- Erlanandard, 2014, Sejarah Hukum Humaniter, <https://erlanandard.wordpress.com/2014/12/08/29/>, diakses 5 November 2018.
- Evan Hardoko, 2018, Pasukan Peshmerga Siap Bantu Kurdi Suriah Menghadapi Turki, <https://internasional.kompas.com/read/2018/01/23/19044441/pasukan-peshmerga-siap-bantu-kurdi-suriah-menghadapi-turki>, diakses 19 Oktober 2018.
- Global Security, 2016, Kongra-Gel, Kurdistan Freedom and Democracy Congress (KADEK), Kurdistan Workers' Party (PKK), <https://www.globalsecurity.org/military/world/para/pkk.htm>, diakses 27 Maret 2019.
- ICRC, 2019, *Hague Conventions*, <https://casebook.icrc.org/glossary/hague-conventions>, diakses 19 Maret 2019.
- Institute for Security and Development Policy (ISDP), 2016, Turkey's Kurdish Conflict: 2015-Present, 2016, <http://isdp.eu/content/uploads/2016/12/2016-Turkeys-Kurdish-Conflict-2015-Present.pdf>, diakses 26 Maret 2019.
- Pandasurya Wijaya, 2018, Sejarah Konflik Turki vs Kurdi, <https://www.merdeka.com/dunia/sejarah-konflik-turki-versus-kurdi.html>, diakses 11 Mei 2018.
- Pusat Ensiklopedia Khusus, n.d. Doktrin tentang Perang yang Sah (Teori Perang Sah), http://www.area.web.id/id3/1197-1094/Doktrin-Tentang-Perang-Yang-Sah_179828_area.html, diakses 20 Maret 2019.

Refworld, 2007, Turkey: Status of the Kurdistan Workers' Party (PKK) and Turkish Hezbollah; situation and treatment of members, supporters and sympathizers of these parties (2006-2007, <https://www.refworld.org/docid/46fa537528.html>, diakses 27 Maret 2019.

Reuters, 2011, Factbox: What Is The Kurdistan Workers Party (PKK). <https://www.reuters.com/article/us-turkey-kurds-pkk/factbox-what-is-the-kurdistan-workers-party-idUSTRE77H54620110818>, diakses 19 April 2019.

RFE/RL, 2013, Facts and Figures: Kurdistan Worker Party, <https://www.rferl.org/a/profile-history-pkk-kurdish/24935503.html>, diakses 12 Maret 2019.

Smith Alhadar, 2017, Dampak Kemerdekaan Kurdistan bagi Bangsa Arab, <http://mediaindonesia.com/read/detail/124472-dampak-kemerdekaan-kurdistan-bagi-bangsa-arab>, diakses 20 April 2019.

Wikipedia, 2018, Gerakan Aceh Merdeka, https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_Aceh_Merdeka, diakses 10 September 2018.

Wikipedia, 2019, 2015 Sulu bombing, https://en.wikipedia.org/wiki/2015_Sulu_bombing, diakses 6 Maret 2019.

Wikipedia, 2019, Kudeta, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kudeta>, diakses 27 Maret 2019.

Zakky, 2018, Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/>, diakses 27 Agustus 2018.

LAMPIRAN